

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk membantu penelitian ini melihat fenomena rendahnya partisipasi politik perempuan di Indonesia dan belahan dunia lainnya. Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah untuk membandingkan penelitian sebelumnya esrta mengisi celah yang belum terisi oleh penelitian yang sudah ada dan memperkaya penelitian mengenai strategi komunikasi SBCC dan partisipasi politik perempuan. Penelitian terdahulu yang dipilih juga sudah disortir memiliki topik yang serupa dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan referensi dan dsebagai pembanding dalam penelitian ini.

Menurut Suwartono (2014) dalam bukunya mengatakan bahwa Setelah memilih topik penelitian, seorang peneliti harus mencari informasi atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik tersebut. Manfaatnya adalah untuk membangun hipotesis yang kokoh atau membuat gambaran serta penguasaan yang lebih baik tentang hal yang akan diteliti (teoritis) maupun seluk – beluk bagaimana penelitian sebaiknya dilakukan (metodologis).

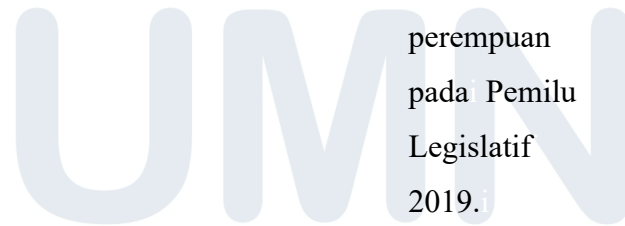
Masih menurut Suwartono, sumber data yang harus diprioritaskan termasuk buku yang paling utama dikarenakan buku adalah sumber ilmu dan dari buku kita mendapatkan banyak ilmu. Selanjutnya, jurnal ilmiah yang berbentuk cetak maupun elektronik atau digital dan sumber – sumber ini harus dipublikasikan kurang dari 10 tahun kebelakang. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik peneliti:

No	Item	Jurnal 1	Jurnal 2	Jurnal 3	Jurnal 4	Jurnal 5	Jurnal 6
1.	Judul Artikel Ilmiah	Strategi Public Relations Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	STRATEGI PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM KOMUNIKASI DIGITAL PARTAI AMANAT NASIONAL	Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender	<i>The Relationship between Civil Society Organization and Political Party in Legislative Election: The Case of Fatayat and PKB in Indonesia</i>	GERAKAN POLITIK PEREMPUAN PARTAI GOLKAR KOTA PEKANBARU PERIODE 2004 – 2009 DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN	Peran Kader Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Optimalisasi Partisipasi Politik Perempuan Melalui Program Pemberdayaan di Kota Depok Pasca Pemilu 2019

Kabupaten
Semarang

2. Nama Lengkap Peneliti, Tahun Terbit, dan Penerbit	Jessira Musafa, Zon Vanel, 2024, ISA: Journal of Visions and Ideas, Vol 4 No 3 (2024), 2549–2573.	Dinar Mahkota Perameswari, Jurnal Media Akademik (JMA) Vol.2, No.1 Januari 2024, Hal 1072-1086.	Very Wahyudi, Politica: Jurnal Politik Islam, Vol. 1 No.1 (Jan – Jun) 2018, hlm. 63-83.	M. Anas Mahfudhi dan Aditya Perdana. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022, vol. 12, No. 1: 105 – 126.	Wan Asrida, Wazni, dan Chitra Puspita Dewi. Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 11. No. 17. 2012. 23 Oct 2013.	Vivih Ashfia Haq. PARAPOLITIKA <i>Journal of Politics and Democract Studies (JPDS)</i> . Volume 5 Nomor 1, Februari – Agustus 2024.
3. Fokus Penelitian	Penelitian ini berfokus pada strategi <i>public relations (PR)</i>	Penelitian ini berfokus pada strategi pemanfaatan	Penelitian ini berfokus pada	Artikel ini bertujuan untuk menganalisis	Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi dan posisi perempuan	Penelitian ini berfokus pada mengkaji mengenai

yang diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Semarang.	media sosial dalam komunikasi digital Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mempromosikan nasionalisme dan nilai – nilai dalam berbagai acara politik.	bagaimana peran politik perempuan dalam dinamika perpolitikan Indonesia selama ini.	strategi politik Fatayat sebagai organisasi masyarakat sipil dalam upaya memenangkan calon anggota legislatif (caleg) perempuan pada Pemilu Legislatif 2019.	dalam Partai Golkar dan mendeskripsikan gerakan perempuan dalam Partai Golkar di Kota Pekanbaru.	peranan politik kader perempuan PKS dalam melakukan program RKI guna mencari kader – kader baru.
--	---	---	--	--	--



UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

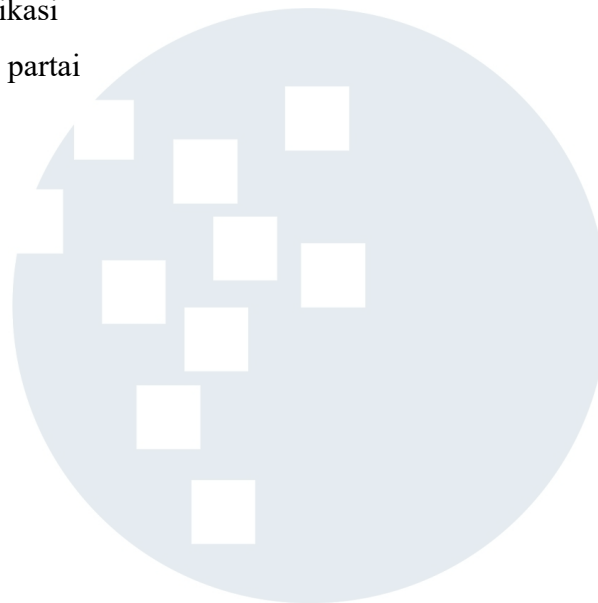
4. Teori	<i>Public Relations (PR)</i> , strategi publisitas, persuasi, argumentasi, dan pencitraan digunakan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di ranah politik.	Teori yang digunakan adalah teori komunikasi politik dan semiotika.	Teori Gender dan Demokrasi.,	Teori yang digunakan adalah Gwendolyn Bevis tentang <i>Civil Society and Political Parties</i> dan teori Peter Schoder tentang strategi politik.	Teori yang digunakan adalah demokrasi dan feminisme.	Teori yang digunakan adalah peran representatif perempuan oleh Anne Pillips dan Hana Pitkin.
5. Metode Penelitian	Metode Kualitatif, Pengumpulan data dengan wawancara,	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Metode yang digunakan kepustakaan.	Metode kualitatif dengan teknis pengumpulan	Metode kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi.	Metode kualitatif deskriptif. Wawancara dan observasi.

observasi, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

data melalui wawancara.

<p>6. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan</p>	<p>Penelitian ini memiliki Kesamaannya yaitu penelitian dilakukan di Partai Keadilan Sejahtera. Topik yang dibawakan</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu topik yang diangkat adalah melihat bagaimana strategi komunikasi yaitu media sosial dalam</p>	<p>Kesamaan dari penelitian ini adalah tentang peran perempuan di ranah politik</p>	<p>Kesamaan dari penelitian ini adalah topik yang diangkat yaitu strategi partai politik dan perempuan.</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu pembahasan yaitu partai politik dan perempuan.</p>	<p>Penelitian ini memiliki kemiripan dari subjek yang diteliti yaitu PKS dan juga perempuan.</p>
---	--	---	---	---	--	--

yaitu komunikasi partisipasi digital partai politik. perempuan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menggunakan metode kualitati.



7. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan

Perbedaan penelitian ini adalah teori yang digunakan yaitu *Public Relations (PR)* sedangkan

Perbedaan penelitian ini adalah teori yang digunakan komunikasi digital dan partai politik.

Perbedaan dari penelitian ini hanyalah sebatas membahas bagaimana peran perempuan

Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus dari penelitian ini yang hanya berfokus pada melihat

Perbedaan dari penelitian ini adalah subjek penelitian yaitu Partai Golkar dan fokus penelitiannya adalah untuk melihat perempuan yang sudah masuk ke

Pembeda dari penelitian ini adalah yaitu teori yang digunakan adalah teori representatif politik.

peneliti menggunakan teori *Social Behaviour and Change Theory (SBCC)*. Penelitian juga dilakukan di daerah yang berbeda yaitu PKS di Kabupaten Semarang. Sedangkan peneliti di PKS Pusat/Jakarta

di ranah politik masih rendah dan alasannya.

bagaimana relasi politik PKB dengan Fatayat.

tatanan di Partai Golkar.



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

8. Hasil Penelitian	<p>Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa strategi yang dipakai oleh PKS seperti kampanye edukasi melalui seminar, workshop, dan media sosial menunjukkan keefektivitasan dalam meningkatkan kesadaran dan</p>	<p>Strategi yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) berhasil untuk merekrut kader muda dan memperkuat posisi partai di politik Indonesia.</p>	<p>Animo perempuan untuk memasuki wilayah publik ini memang sudah meningkat, tetapi persentase totalnya masih rendah walau sudah dijamin oleh undang – undang.</p>	<p>Hasil kajian menunjukkan bahwa relasi Fatayat dan PKB berjalan secara konstruktif karena memiliki sejarah yang mengakar kuat.</p>	<p>Komposisi jumlah perempuan dalam kepengurusan Partai Golkar tiga periode mengalami fluktuasi, peningkatan, dan penurunan.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah bahwa program RKI menunjukkan keberhasilan bagi PKS dengan adanya kenaikan jumlah kader baru, PKS menggunakan strategi peran representatif dan deskriptif dan juga simbolik untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat.</p>
----------------------------	--	--	--	--	--	---

pengetahuan
perempuan
tentang
pentingnya
partisipasi
politik
mereka, yang
berdampak
pada
peningkatan
partisipasi
perempuan
dalam politik
di Kabupaten
Semarang.



UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

No	Item	Jurnal 7	Jurnal 8	Jurnal 9	Jurnal 10	Jurnal 11	Jurnal 12
1.	Judul Artikel Ilmiah	<i>Islam, Parties, and Women's Political Nomination in Indonesia</i>	<i>Indonesian Women's Participation in Politics and Governance: Challenges and Opportunities</i>	<i>The Women Representation Policy and its Effect to Women Political Participation in Jember, Indonesia</i>	<i>Women's Representation and Accessibility in Indonesian Politics: A Study of Regional People's Representative Council</i>	<i>Women's Political Representation, Good Governance, and Human Development</i>	<i>Women's Political Participation in the United States after women's suffrage: Women's representation in the legislature of the house of representatives and the senate</i>
2.	Nama Lengkap	<i>Ella S. Prihatini.</i>	<i>Astrid Meilasari</i>	<i>Ria Angin, Hary Yuswadi,</i>	<i>Siti Maryamah Al-Kadriyah.</i>	<i>Valeriya Mechkova,</i>	<i>Ezra Sherly Margareth</i>

Peneliti, Tahun Terbit, dan Penerbit	<i>University of Western Australia. Cambridge University Press 1743/923X/19, Politics & Gender, 2019, page 1 of 23.</i>	<i>Sugiana dan Dianingtyas M. Putri, TIIKM (The International Institute of Knowledge Management), diterbitkan dalam Proceeding of the International Conference on Future of Women'18, 2018.</i>	<i>Himawan Bayu Patriadi, Nur Dyah Gianawati, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Jember, 2018.</i>	<i>Jurnal Politik, Vol.9 Iss.2, Article 4, 2023.</i>	<i>Sirianne Dahlum, Constanza Sanhueza Petrarca, Governance Volume 37, Issue 1, Pages 19 – 38, 2022.</i>	<i>Silalahi, JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 10, No. 3, Pages 348 – 357, 2024.</i>
3. Fokus Penelitian	Penelitian ini berfokus pada mrespons	Penelitian ini berfokus pada peluang dan	Penelitian ini berfokus pada efek kebijakan	Penelitian ini memiliki fokus untuk menggali	Penelitian ini memiliki fokus dalam	Penelitian ini memiliki fokus untuk

	<p>penelitian sebelumnya tentang islam sebagai penghalang bagi nominasi perempuan dalam politik.</p>	<p>tantangan yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia untuk berpartisipasi politik.</p>	<p>representasi perempuan terhadap partisipasi politik perempuan di Kab. Jember, Indonesia.</p>	<p>tantangan dan dinamika partisipasi politik perempuan di Jakarta, Indonesia.</p>	<p>membahas bagaimana inklusi perempuan dalam politik dapat memengaruhi pemerintahan dan human development.</p>	<p>menyelidiki kesenjangan gender yang terus ada dalam representasi politik, dengan fokus pada pemilihan kongres ke – 113.</p>
<p>4. Teori</p>	<p>Teori yang digunakan disini adalah teori politik dan <i>gender</i>.</p>	<p><i>Theory of mainstream democracy</i>, yang menyoroti pentingnya partisipasi luas dan kesetaraan kesempatan</p>	<p>Teori yang digunakan adalah kebijakan kuota gender.</p>	<p>Teori yang digunakan Partisipasi politik dan <i>gender justice theory</i>.</p>	<p>Teori yang digunakan adalah representasi politik perempuan.</p>	<p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah feminisme liberal dan demokrasi.</p>

			dalam demokrasi perwakilan.			
5. Metode Penelitian	Metode kualitatif. Wawancara mendalam dengan pejabat pusat partai, pemimpin fraksi, dan anggota parlemen.	Metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan	Metode yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif dengan Sumber data adalah partai politik pejabat, distrik komisi pemilihan umum dari Jember, kandidat wanita yang terlibat dalam implementasi	Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan melibatkan wawancara komprehensif terhadap perempuan anggota DPRD DKI Jakarta.	Analisis kuantitatif dengan data time-series cross-sectional dari 182 negara dari tahun 1900 – 2014	Analisis kuantitatif data pemilu dan tinjauan literatur.

purposive perempuan
sampling kebijakan
 untuk memilih perwakilan
 informan yang politik. Data
 sesuai dengan Metode
 penelitian. pengumpulan
 yang
 digunakan
 adalah
 mendalam
 wawancara,
 dan
 dokumentasi.

6. Persamaan dengan penelitian	Penelitian ini memiliki kemiripan dari subjek yang diteliti	Penelitian ini memiliki kemiripan dari topik yang diangkat yaitu	Penelitian ini memiliki kemiripan dari topik yang diangkat yaitu	Penelitian ini memiliki kesamaan pada topik yang diangkat yaitu	Persamaan penelitian ini adalah dari topik yang diangkat yaitu	Persamaan penelitian ini adalah pada subjek penelitian yaitu perempuan

yang dilakukan	yaitu partai politik dan perempuan.	partisipasi politik perempuan di Indonesia	partisipasi politik perempuan di Indonesia.	partisipasi politik dan perempuan di Indonesia.	partisipasi politik perempuan.	dalam ranah politik.
7. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan	Pembeda dari penelitian ini adalah penelitian ini detail dalam pengambilan data dikarenakan data didapatkan dari pusat partai, pemimpin fraksi dan anggota parlemen.	Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini memiliki fokus bagaimana tantangan dan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi politik di Indonesia.	Perbedaan penelitian ini adalah fokus dari. Penelitian ini adalah melihat bagaimana undang – undang dapat mempengaruhi partisipasi politik perempuan di Kab. Jember.	Perbedaan penelitian ini adalah fokus pada penelitian ini adalah melihat tantangan dan dinamika atau hambatan pada perempuan untuk berpartisipasi politik di Indonesia.	Perbedaan dari penelitian ini adalah dari metode yang digunakan adalah kuantitatif, fokus dari penelitian ini juga berfokus pada bagaimana representasi politik perempuan mempengaruhi pemerintahan	Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus pada pemerintahan amerika dan hambatan perempuan untuk berpolitik di amerika.

	Sehingga, hasil data lebih detail.					dan human development.
8. Hasil Penelitian	Penelitian ini menunjukkan bahwa Islam sebagai ideologi partai tidak lebih dari ketidakadilan gender. Walaupun terdapat kuota 30% yang mendukung tetapi, ketidaktulusan partai	Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perempuan menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya sumber daya untuk kampanye dikarenakan mereka seringkali dipaksa untuk	Dalam penelitian ini ditemukan bahwa implementasi kebijakan yang jelas dengan sanksi dapat meningkatkan kepatuhan partai politik dalam memenuhi kuota 30% untuk perempuan. Kebijakan	Temuan penelitian ini mengungkapkan adanya interaksi yang kompleks antara latar belakang pendidikan, motivasi poltiik, dinamika partai di Indonesia dan persepsi masyarakat Indonesia yang sangat	Penelitian ini menemukan bahwa untuk memaksimalkan dampak positif dari representasi perempuan dalam politik diperlukan lingkungan yang bebas dari korupsi yang memungkinkan perempuan memiliki peran	Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan mencolok antara negara – negara seperti Amerika Serikat dan Rwanda yang menekankan pentingnya mekanisme pemilu dalam mendorong kesteraan gender.

terhadap	dirumah saja,	tersebut	berpengaruh	sebagai agen
perempuan	kekerasan	memiliki	terhadap karier	perubahan.
untuk	dalam politik,	pengaruh	politik	
kemajuan	ideologi	terhadap	perempuan.	
politik	patriarkal, dan	jumlah		
perempuan	iklim politik	kandidat		
dapat dilihat	yang	perempuan di		
dari posisi	seringkali	Jember,		
daftar suara,	diskriminatif.	khususnya		
dimana laki –	Dalam	setelah adanya		
laki terus	penelitian ini	peraturan yang		
mendominasi	juga	ketat dan		
kursi – kursi	menekankan	ancaman		
utama dan	pentingnya	sanksi.		
mencalonkan	praktik terbaik			
diri sebagai	seperti undang			
kandidat	- undang			
nomor satu	yang			
dan dua.	membantu			
Kandidat	perempuan			
nomor satu	untuk			

atau dua berpolitik,
sangat kuota untuk
penting untuk partisipasi
elektabilitas perempuan,
perempuan pendidikan
karena politik untuk
hampir 70% perempuan,
anggota dan
parlemen pemberdayaan
terpilih sosial. Hasil
berasal dari ini
posisi ini. menunjukkan
Mengabaikan bahwa
pentingnya keberhasilan
posisi surat perempuan
suara dalam politik
merusak memiliki
efektivitas ketergantungan
kuota gender. pada struktur
yang
mendukung

dan
peningkatan
rasa percaya
diri di antara
perempuan itu
sendiri.

Tabel 2.1 Jurnal Penelitian Terdahulu

Sumber: Olahan Peneliti (2024)



2.2. Landasan Teori

2.2.1 Partisipasi Politik

Menurut Suparto (2021) mendefinisikan partisipasi politik sebagai sebuah kegiatan keikutsertaan masyarakat pada aktivitas serta kegiatan politik, baik dari rangkaian pemilihan ataupun aktivitas politik lainnya. Partisipasi politik masyarakat sejatinya dapat mempengaruhi perumusan kebijakan yang dilakukan. Konsep berpartisipasi pada perpolitik mempunyai arti yang mendalam. Hal ini tergambar dari penjelasan teoritis para ahli seperti Tangkilisan dalam buku ini membahas mengenai urgensinya partisipasi sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan dalam pembangunan. Partisipasi ini mengarah pada keikutsertaan masyarakat umum (tanpa kekuasaan) berpartisipasi dalam memberikan pengaruh perumusan dan terlaksananya perpolitikan dalam bentuk kebijakan publik. Aktivitas masyarakat dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Aktivitas yang dapat berpengaruh pada kebijakan publik.
2. Berpartisipasi dalam perumusan serta pelaksanaan keputusan politik.

Menurut Syahril dalam buku ini mendefinisikan Partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai aktivitas individu maupun kelompok orang yang aktif berpartisipasi dalam perpolitikan. Contoh partisipasi politik termasuk ikut aktif dalam membentuk kebijakan pemerintah dan memilih presiden dalam pemilu. Sedangkan, menurut Handoyo dalam buku ini menjelaskan bahwa dalam ilmu politik, teori sosiologi politik digunakan untuk mempelajari partisipasi politik secara khusus. Menurut Meriam Budiardjo dalam buku ini menyebutkan bahwa partisipasi politik umumnya merupakan aktivitas individu atau kelompok yang terlibat aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih presiden, mempengaruhi perumusan kebijakan secara langsung atau tidak langsung.

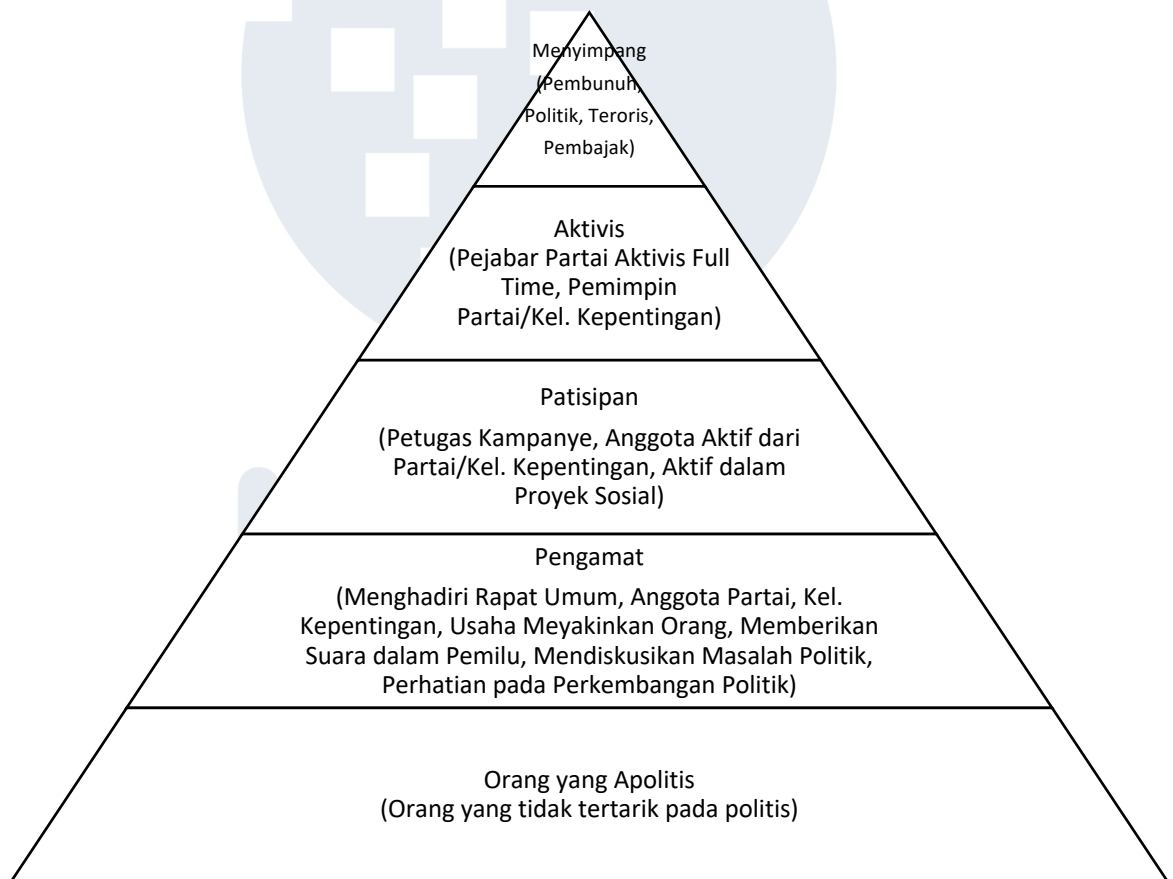
Menurut McClocky dalam buku ini mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas ikhlas masyarakat dengan cara masyarakat ikut menjelaskan proses memilih pemimpin serta terlibat pada rangkaian dibentuknya kebijakan publik, bisa dengan terlibat langsung ataupun tidak. Lebih detail, Dusseldorp dalam buku ini menjelaskan partisipasi adalah aktivitas/kondisi melakukan tindakan guna mewujudkan kebermanfaatan lebih maksimal.

Dari beberapa definisi diatas Rahman (2007) menyimpulkan jenis – jenis makna partisipasi politik adalah berkaitan dengan aktivitas yang bisa dilihat serta bukan tentang perilaku atau orientasi. Partisipasi politik berkaitan sesuatu yang bukan subjektif tapi objektif. Selanjutnya, Aktivitas politik masyarakat biasa sebagai warga negara dapat dilakukan dengan langsung maupun secara tidak langsung. Aktivitas ini memiliki tujuan sebagai upaya untuk mempengaruhi pemerintah dalam memutuskan kebijakan bisa dengan rayuan ataupun tekanan, atau juga penolakan pada tokoh politik serta pemerintah. Aktivitas ditujukan sebagai upaya mempengaruhi pemerintah tanpa berpikir hal yang muncul akan berhasil atau gagal. Aktivitas dijalankan bisa dengan cara yang wajar serta tanpa kekerasan ataupun dengan prosedur diluar kewajaran dalam bentuk kekerasan. Aktivitas yang masuk pada pengertian partisipasi politik meliputi berbagai hal berikut:

1. Partisipasi politik merupakan aktivitas masyarakat umum yang bisa dilihat serta tidak berupa sikap serta orientasi.
2. Aktivitas tersebut dilakukan agar pemerintah terpengaruh sebagai perumus serta yang menjalankan keputusan politik.
3. Aktivitas sukses maupun yang gagal memberikan pengaruh pada keputusan politik.
4. Aktivitas memberikan pengaruh politik pemerintah bisa dilaksanakan baik langsung maupun tidak langsung.

5. Aktivitas memberikan pengaruh pada pemerintah bisa dilaksanakan dengan cara yang wajar dan dengan prosedur tepat.
6. Aktivitas perorangan tujuannya mempengaruhi pemerintah. Aktivitas ini dijalankan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun.

Tingkatan Partisipasi Politik menurut David F. Roths dan Frank I. Wilson dalam buku Budiyarto adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Gambar Piramida Tingkatan Partisipasi Politik

Sumber: Suparto (2021)

Menurut Huntington & Nelson (1990) ada 2 cara untuk menjelaskan partisipasi politik di Indonesia, yaitu:

1. Partisipasi politik Otonom, merupakan sebuah partisipasi karena kesadaran diri sendiri.
2. Partisipasi politik karena adanya dorongan atau pengaruh dari luar.

Umumnya partisipasi politik otonom ada sebab dipahaminya persepsi objek politik secara penuh. Pemahaman tadi membuat pengertian lengkap terhadap kenyataan pada objek politik, yang menyebabkan afeksi pada wujud keputusan yang berpihak kepada objek politik tertentu dengan penuh kesadaran tidak ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun. Kebalikan dari partisipasi politik yang dikoordinir yaitu disebabkan adanya tekanan sejumlah faktor yang berasal dari pihak eksternal pelaku politik tadi serta umumnya mengesampikan proses membangun konsep dari persepsi pada kejadian objek politik. Akibatnya partisipasi model koordinir ini umumnya memiliki ciri insidental serta tidak abadi, karena disebabkan adanya saingan dan aneka macam hal yang mempengaruhi pada keputusan keberpihakan seseorang pada objek politik eksklusif. Karena hal ini muncul oportuniste seorang pada politik.

Menurut Surbakti (2010), menjabarkan tentang berbagai hal yang dianggap bisa memberikan pengaruh besar atau kecil partisipasi politik individu yaitu masalah kesadaran politik. Adapun hal dari luar mencakup kinerja pemerintah, partai politik dan rasa percaya masyarakat. Adapun kesadaran politik artinya adalah kesadaran adanya hak serta kewajiban menjadi rakyat dalam lingkup sebuah negara. Hal tersebut berhubungan dengan pengetahuan seseorang, tempat tinggal masyarakat serta politik dan berkaitan dengan keinginan seorang dimana tempat mereka tinggal, serta pedoman agama juga berpengaruh. Faktor lainnya adalah penilaian seseorang tentang kondisi ekonomi serta sosial mereka, rekanan politik keturunan dan adanya organisasi yang menjadikan dasar politiknya. Kondisi sosial

adalah status seseorang pada masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor seperti derajat orang tua, tingkatan lulus sekolah atau status pekerjaan. Kondisi ekonomi adalah status yang berkaitan pada lapisan masyarakat sesuai dengan jumlah harta yang dimilikinya. Kaitannya dengan harta bisa terlihat dari jumlah pendapatan serta pengeluaran atau dari kepemilikan harta benda. Seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi baik secara ekonomi atau sosial, bukan hanya mempunyai keinginan serta perhatian di bidang politik atau ada keinginan jadi pejabat pemerintahan. Kesadaran politik masyarakat adalah bagian dari negara yang menjadi faktor penentu partisipasi politik masyarakat. Berbagai pengetahuan dan keadaran akan hak dan kewajiban terkait pemanfaatan lingkungan hidup rakyat dan kegiatan politik merupakan besaran dan tingkat partisipasi seseorang dalam politik.

W. Page dalam Rahman (2007), melihatnya berdasarkan kondisi tersebut membagi partisipasi menjadi 4 model partisipasi politik, yaitu:

1. Ketika seseorang mempunyai pencerahan politik serta ilmu atau pemahaman terhadap sistem pemerintah besar, tentu partisipasi politik akan aktif.
2. Kebalikannya jika tingkat kesadaran serta pemahaman dan keyakinannya rendah, tentu partisipasi politik akan semakin pasif serta apatis.
3. Kesadaran politik besar tapi tidak terlalu percaya pada pemerintah, tentu sikap yang ada yaitu militan radikal.
4. Kesadaran politik kecil namun keyakinan pada pemerintah besar, maka partisipasi sangat pasif, maka fokusnya pada *output* politik.

Warga negara yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pada pemilihan umum dengan memberikan hak suara atau aktivitas lainnya untuk berpartisipasi pada jalannya pemilu atau didorong oleh keyakinan tentang aktivitas pemilu tersebut buat kepentingan beserta

menentukan calon pemimpin terpilih untuk kesejahteraan masyarakat. Keaktifan dalam partisipasi politik tentunya bisa memberikan pengaruh terhadap langkah kepala wilayah atau kepala negara yang terpilih pada perumusan serta kebijakan dan keputusan yang mengikat. Oleh karena itu, mereka yakin bahwa aktivitas mereka memiliki dampak pada bidang ranah politik (Suwartono, 2014).

Masih menurut Suwartono, sikap politik seseorang bisa dilihat dari wujud partisipasi politik yang dijalankannya. Beberapa orang memiliki pemikiran bahwa warga serta sistem perpolitikan yang ada dievaluasi sudah menyimpan dari hal yang seharusnya, akibat dari hal ini adalah banyak masyarakat yang akhirnya tidak tertarik untuk ikut serta pada politik. Menurut Surbakti (2010) ada beberapa cara untuk menghasilkan kategori atau jenis partisipasi politik seperti dibagi menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Sesuai dengan tingkat, frekuensi dan intensitas kesadaran politik, partisipasi reguler dan nonkonvensional dalam politik. Tipe politik tersebut adalah:

1. Digolongkan menjadi partisipasi aktif serta partisipasi pasif. Partisipasi aktif artinya aktivitas berdasarkan dari proses input serta hasil politik, adapun partisipasi pasif adalah aktivitas yang hanya melihat *output*.
2. Melihat klasifikasi partisipasi politik dari perspektif stratifikasi sosial. Partisipasi politik dapat ditinjau dari perspektif stratifikasi sosial, meliputi 6 tingkatan, yaitu pemimpin politik, aktivis politik, dan komunikator (menerima dan menyampaikan ide, pemikiran, sikap dan informasi politik baru lainnya kepada masyarakat luas, komunitas nasional, orang – orang yang terpinggirkan (mereka yang jarang menandatangani kontrak politik), dan orang – orang yang terisolasi (partisipasi sporadis dalam politik).

3. Bagi jumlah peserta politik dengan jumlah aktor bagi jumlah peserta politik dengan jumlah aktor yaitu individu dan kolektif. Maksudnya adalah surat tersebut berisi permintaan atau pengaduan kepada pemerintah. Pada saat yang sama, partisipasi kolektif mengacu pada kegiatan dimana masyarakat negara secara bersamaan mempengaruhi otoritas seperti pemilihan umum.
4. Klasifikasi partisipasi politik menurut tingkat kesadaran politik dilihat dari kesadaran politik dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah (sistem politik), partisipasi dibagi menjadi 4 jenis yaitu partisipasi aktif, partisipasi radikal, partisipasi aktif dalam depresi (ketidapedulian), dan partisipasi pasif.
5. Berdasarkan partisipasi politik frekuensi dan intensitas. Dalam hal ini, partisipasi politik dapat dikelompokkan menjadi aktivis, partisipan dan pengamat. Hal ini digambarkan pada gambar 2.1. yang dimana struktur ini menggambarkan tingkat partisipasi politik dalam kekuasaan dan berlaku untuk semua jenis sistem politik yang ada di dunia. Definisi tersebut berasal dari berbagai kelas pada gambar 2.1. yang dimana dapat dilihat dari skala kegiatan yang berkaitan dengan politik, kelas yang satu berbeda dengan kelas yang lain. Apolitis adalah orang yang tidak tertarik pada kegiatan politik apapun, berdasarkan dari gambar 2.1. apolitis adalah tingkat paling bawah dari partisipasi politik. Diatasnya ada pengamat termasuk didalamnya anggota yang berpartisipasi dalam pertemuan non – profesional, partai politik atau kelompok yang berkepentingan, mendiskusikan tema politik, update dengan info politik lewat media sosial atau massa, dan ikut serta pada pemilu. Selanjutnya, ada partisipan yang dimana

meliputi menjadi petugas di kampanye, anggota aktif dari partisipan partai politik, aktif dalam proyek sosial. Aktivis yang dimana mereka adalah pejabat partai *full – time* yang dimana mereka bekerja penuh di pemerintahan yang termasuk juga pemimpin partai. Terakhir, menyimpang yaitu kelompok pembunuh, teroris, pembajak.

6. Kelompok partisipasi politik pada konvensional serta nonkonvensional. Kegiatan konvensional merupakan partisipasi politik yang wajar pada demokrasi modern. Wujud nonkonvensional baik sebagai yang mungkin mirip petisi serta ilegal, mirip perilaku politik yang berisi kekerasan, serta revolusioner. Wujud frekuensi partisipasi politik bisa dipakai sebagai penilaian untuk mengukur kestabilan politik, integritas politik, serta tingkat kepuasan masyarakat.

Menurut Suparto (2021) secara prinsip, demokrasi memiliki arti partisipasi semua masyarakat pada kebijakan politik serta melaksanakan peraturan pemerintahan. Kebijakan politik artinya konvensi diputuskan sebagai aturan yang bertujuan untuk menata kehidupan semua tingkatan masyarakat. Kesadaran politik dalam suatu negara sebagai wujud determinan pada partisipasi politik masyarakat, merupakan aneka macam hal pengetahuan serta kesadaran pada hak dan kewajiban yang kaitannya pada warga daerah, serta politik sebagai hal yang berpengaruh dengan kehidupan seseorang yang menjadi bagian dalam proses partisipasi politik. Kesadaran politik memiliki faktor serta keyakinan pada pemerintah bukan sesuatu yang muncul sendiri. Faktor ekonomi serta berbagi keadaan yang ada menjadi bagian yang memiliki pengaruh pada faktor tersebut.

Saat ini kata partisipasi politik cenderung dikoneksikan dengan dukungan masyarakat untuk menjalankan keputusan yang sudah

diterapkan para pemimpin politik serta pemerintahan. Sebaliknya sporadis kita bisa menerima masukan serta menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembuatan keputusan. Menurut Weiter dalam Syarbaini et al. (2013), terdapat 5 hal yang menjadi sebab seseorang tertarik melakukan aktivitas untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam proses politik, yaitu:

1. Bidang kehidupan yang semakin maju dan modern menjadi masyarakat semakin banyak mengajukan tuntutan agar masuk dalam kursi kekuasaan pemerintahan.
2. Struktur kelas sosial yang banyak berubah. Seorang individu yang berpartisipasi politik tentunya menjadi bagian penting akibat pada penetapan keputusan politik dan perubahan sistem partisipasi politik.
3. Munculnya masyarakat intelektual serta pengetahuan komunikasi massa modern. Ide demokrasi partisipasi sudah melebar ke bangsa lain sebelum mereka berbagai modernisasi serta industrialisasi.
4. Konflik yang terjadi antar kelompok politik.
5. Pemerintah juga mempunyai andil sangat besar dalam berbagai hal, baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Keleluasaan yang dimiliki pemerintah banyak menciptakan tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk terlibat dalam pembuatan keputusan politik.

Bagi masyarakat yang hidup di negara demokrasi, partai politik yang ada di negara tersebut cenderung menari dukungan massa dengan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga masyarakat cenderung berpartisipasi dalam politik.

Ernst et al. (2024) juga membahas dalam jurnalnya bahwa partisipasi politik perempuan adalah tentang bagaimana seluruh negara harus mendukung *Sustainable Development Goal* yang ke 5 yaitu

perlunya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai level. Jurnal ini fokus membahas partisipasi politik di Amerika Selatan yang dimana penting untuk mencapai kesetaraan gender serta mendorong kebijakan publik yang peka terhadap gender di negara – negara Amerika Selatan. Pembahasan pada jurnal ini juga mendukung beberapa konsep partisipasi politik berdasarkan buku (Suparto, 2021), yang dimana partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas politik. Mengacu pada sejarah ketidakhadiran perempuan di ruang publik di Amerika Selatan dikarenakan warisan kolonial dan patriarki membuat partisipasi perempuan menjadi tantangan yang kompleks. Sehingga, berbagai negara di Amerika Selatan mengadopsi kuota gender seperti di Indonesia dalam pemilihan politik untuk meningkatkan representasi perempuan. Misalnya, di Argentina adalah negara pertama yang menerapkan kuota gender pada tahun 1991 diikuti oleh negara lain dengan menerapkan undang – undang paritas untuk memastikan keseimbangan gender dalam parlemen.

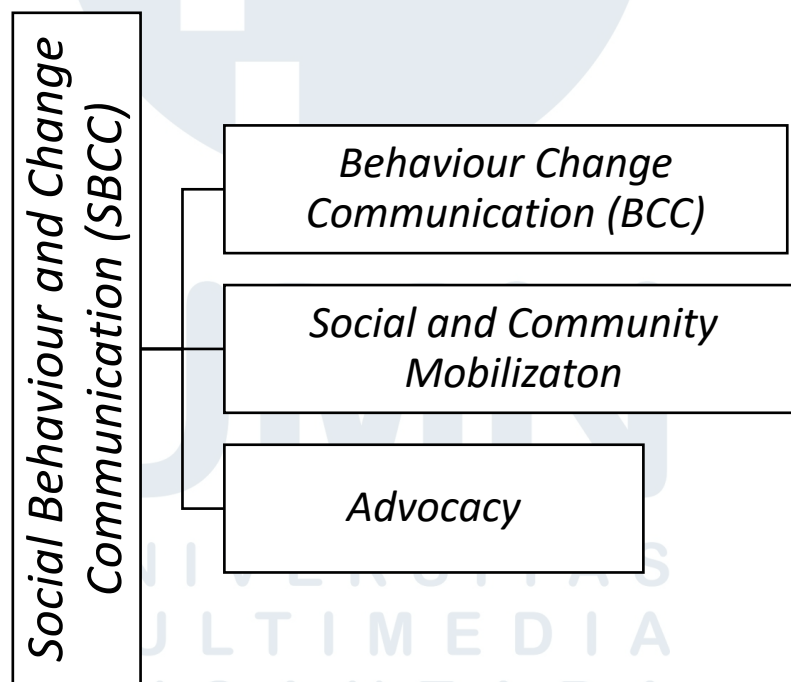
2.2.2 Social Behaviour and Change Communication (SBCC)

Social Behaviour and Change Communication (SBCC) menurut Eileen dalam Solihin et al. (2022) adalah sebuah metode dalam mempromosikan perubahan perilaku positif. Dalam SBCC fokus utamanya adalah memfasilitasi adanya perubahan perilaku individu, rumah tangga, komunitas, untuk mengadopsi dan mempertahankan praktik yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan dan nutrisi.

Menurut Mckee et al. (2014) menjelaskan bahwa pendekatan ini mengacu pada ilmu sosial dan teori perubahan perilaku untuk mengatasi perilaku dan lingkungan dimana perubahan perilaku terjadi. SBCC dibangun dengan pendekatan sosioekologis untuk menciptakan perubahan sosial. Model ini memiliki pandangan

perubahan sosial dan perilaku yang dipengaruhi oleh faktor politik dan lingkungan. Teori ini memiliki asumsi bahwa kesehatan masyarakat erat kaitannya dengan faktor sosial, politik, lingkungan, dan perilaku tempat tinggal orang. Oleh karena itu SBCC memberikan penekanan adanya perspektif ekologi yang menjadi dasar pembuatan strategi komunikasi yang bertingkat, seperti pesan yang disesuaikan ditingkat individu, pesan yang ditargetkan pada tingkat kelompok yang berbeda, pemasaran sosial di tingkat masyarakat yang berbeda, advokasi media pada tingkat kebijakan, dan terakhir kampanye media pada tingkat populasi.

SBCC menggunakan 3 strategi utama, yaitu:



Gambar 2.2 Gambar Social Behaviour and Change Theory

Masih menurut Mckee, SBCC menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk mendorong dan mempertahankan perilaku positif diantara individu, komunitas dan masyarakat. SBCC menggunakan proses sistematis yang mencakup penelitian formatif

dan analisis perilaku; perencanaan komunikasi, pelaksanaan, dan pemantauan; menciptakan lingkungan yang mendukung hasil yang diinginkan; evaluasi. SBCC memiliki keharusan yaitu memberdayakan dan bersifat horizontal, mendorong masyarakat untuk menjadi agen perubahan mereka sendiri yaitu dengan mempromosikan dialog, debat, dan negosiasi. Menekankan proses interaksi, pengetahuan bersama, dan juga tindakan kolektif. Berfokus pada perubahan norma sosial, kebijakan, dan budaya untuk mengungkap perubahan berkelanjutan di masyarakat dan diantara individu. Menurutnya ada tiga elemen inti SBCC. Yaitu:

1. Komunikasi, dimana harus memahami kebutuhan, dorongan dan preferensi target audiens untuk membuat konsep pesan dan pendekatan yang disesuaikan di seluruh saluran komunikasi.
2. Perubahan Perilaku, intervensi dan upaya untuk membawa perubahan perilaku yang diinginkan dengan cara yang mudah dan layak sambil melindungi dan meningkatkan hasil yang sudah ada.
3. Perubahan Sosial, mencapai pergeseran dalam definisi dan persepsi masalah, dalam partisipasi masyarakat, dalam kebijakan, sikap dan perilaku sosial.

Teori dan model sangat penting untuk perencanaan program karena mereka mengidentifikasi dan memperjelas asumsi di balik pengembangan intervensi dan strategi. Mereka dapat membantu merumuskan tujuan komunikasi untuk program dan menentukan bagaimana mengukurnya, serta memberikan penjelasan alasan mengapa program berhasil atau gagal (Mckee et al., 2014). Praktisi komunikasi pembangunan sekarang mengakui 4 fakta kunci tentang perilaku manusia, yaitu:

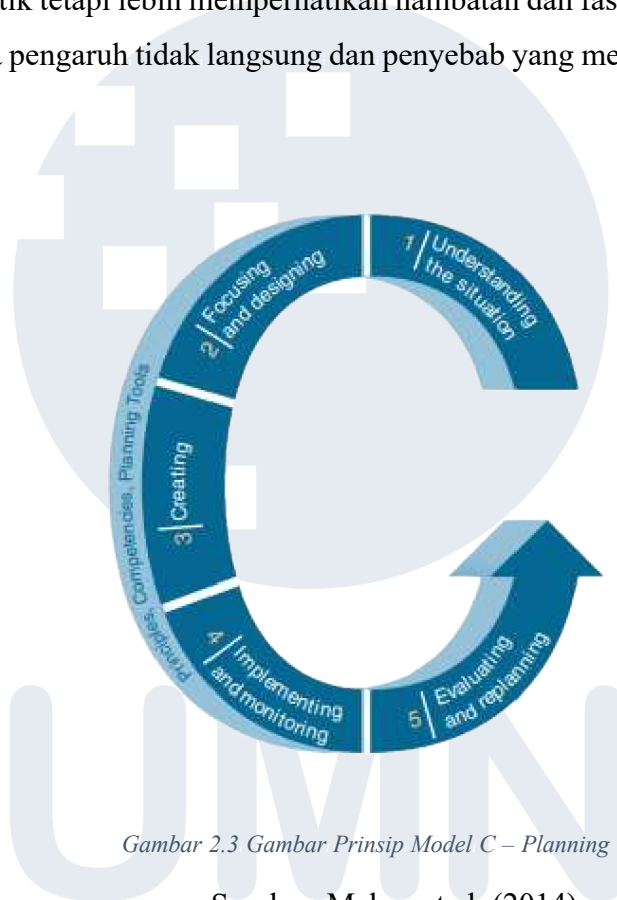
1. Orang memberikan makna pada informasi berdasarkan konteks dimana mereka tinggal.
2. Budaya dan koneksi mempengaruhi perilaku masyarakat.

3. Orang tidak selalu bisa mengendalikan masalah yang menentukan perilaku mereka.
4. Keputusan masyarakat tentang kesehatan dan kesejahteraan bersaing dengan prioritas lain.

Menurut kerangka kerja komunikasi perubahan, SBCC terdiri dari aplikasi sistematis dari proses dan strategi komunikasi interaktif, berbasis teori, dan berbasis penelitian untuk mengatasi titik kritis untuk perubahan di tingkat individu, komunitas, dan sosial. Alih – alih perubahan perilaku individu sebagai bawaan lahir, kerangka SBCC memerlukan analisis sosioekologis untuk menemukan titik kritis di berbagai tingkatan. Menurut (McKee et al., 2014) titik kritis mengacu pada dinamika perubahan sosial, dimana perubahan kecil yang terkadang tidak dapat diprediksi dengan cepat mempercepat perubahan dan dapat menjadi perubahan permanen. Hal ini dapat berupa peristiwa yang terjadi secara alami atau sesuatu yang ditentukan atau diteliti dan direncanakan seperti “kemauan politik” oleh kepemimpinan senior yang memberikan dorongan terakhir untuk “menggulingkan” hambatan untuk berubah. Titik kritis mungkin memerlukan proses yang membangun momentum ke titik dimana perubahan memperoleh kekuatan dan menjadi tak terbendung. Sementara, menangani perilaku individu dapat mencapai pemberdayaan individu, dan dapat mengatasi persepsi perilaku orang lain atau norma sosial yang dirasakan, SBCC dalam hal ini melibatkan proses melihat masalah dari berbagai sisi dengan menganalisis faktor individu, masyarakat, dan lingkungan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan mengubah, ini sering ditemukan dalam norma – norma sosial yang tertanam dalam undang – undang, identitas budaya, kebijakan, dan perilaku serta tekanan kelompok. Dalam SBCC terdapat 3 karakteristik, yaitu:

1. SBCC adalah sebuah proses yang interaktif, diteliti, direncanakan, strategis dengan tujuan untuk mengubah kondisi sosial dan perilaku individu. Model C – Change (komunikasi perubahan) mengikuti

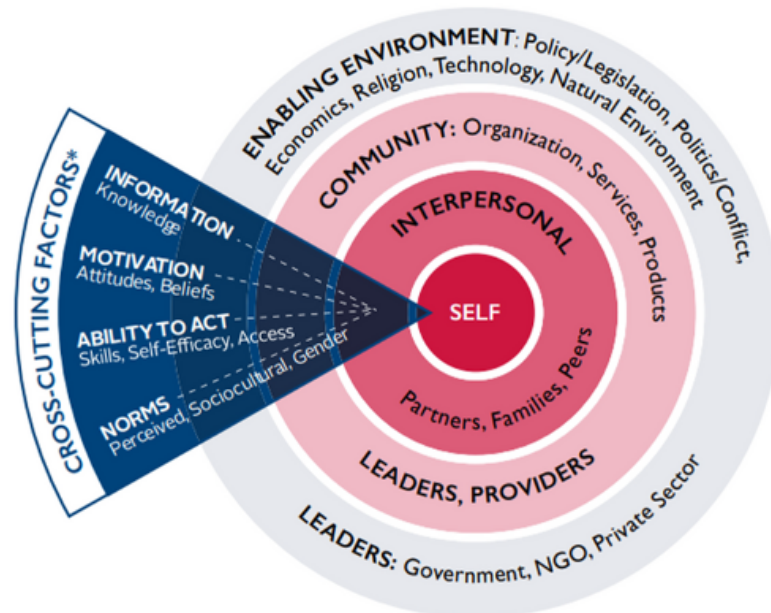
langkah – langkah terkenal dalam komunikasi terapan. Banyak model perencanaan komunikasi telah dikembangkan dalam 30 tahun terakhir, C – Planning berasal dari banyak di antaranya. Namun, perlu dicatat bahwa dalam langkah pertama yaitu memahami situasi pencipta model menekankan lebih dari penelitian formatif pada pengetahuan, sikap dan praktik tetapi lebih memperhatikan hambatan dan fasilitator perubahan serta pengaruh tidak langsung dan penyebab yang mendasarinya.



Gambar 2.3 Gambar Prinsip Model C – Planning

Sumber: Mckee et al. (2014)

2. Model sosioekologis untuk perubahan, pendekatan ini untuk memahami situasi sangat penting untuk sampai pada hambatan dan peluang untuk perubahan sosial dan perilaku, serta untuk merancang strategi yang akan mempercepat perubahan dalam jangka pendek. Model sosioekologi C – Change diturunkan dari tulisan sebelumnya tentang metode partisipatif untuk perubahan perilaku (Mckee et al., 2003).



Gambar 2.4 Dasar Teori untuk Model Sosioekologi

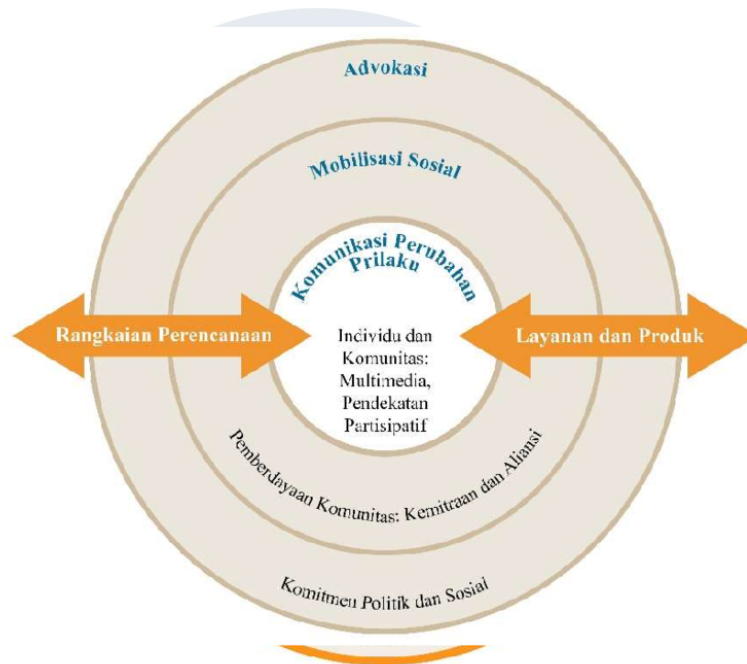
Sumber: Mckee et al. (2014)

Model ini digunakan dalam analisis dan perencanaan, menerapkan konsep inti yang menjadi pusat Sebagian besar model ekologi, seperti penentu lingkungan, kapasitas Masyarakat, dan hubungan antara individu dan konteks social mereka (Richard, Gauvin, dan Rain, 2011) dalam (Mckee et al., 2014). Selain itu, ia juga menawarkan cara praktis untuk menganalisa hambatan dan peluang, sumber pengaruh dan audiens potensial, mitra dan sekutur dari tingkat nasional hingga komunitas, keluarga dan individu berdasarkan dari teori dan model SBCC. Model dan teori sangat penting dalam membimbing SBCC, menyediakan metode untuk mempelajari dan menangani masalah pembangunan. Model sosioekologis C – Change untuk perubahan ini berdasarkan pada teori, model dan pendekatan yang ada dari beberapa disiplin ilmu, termasuk padanya ilmu politik, sosiologi, psikologi, dan komunikasi. Model sosioekologi mengusulkan beberapa tingkat

pengaruh untuk menemukan titik kritis yang efektif untuk perubahan. Model ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Tingkat analisis, yang dimana pada tingkat ini mewakili kedua domain pengaruh serta orang yang terlibat di setiap tingkat. Cincin terdalam mewakili individu yang paling memberikan pengaruh oleh masalah (diri) dan bergerak keluar untuk memberikan pengaruh langsung pada individu (dua cincin dalam). Baik cincin antarpribadi maupun komunitas membentuk komunitas dan norma gender, akses dan permintaan ke sumber daya komunitas dan layanan yang ada. Influencer disini tidak langsung membentuk lingkungan pendukung luar.
2. Faktor lintas sectoral dalam segitiga mempengaruhi masing – masing actor dan struktur dalam ring. Ini termasuk kategori yang lebih besar dari informasi, motivasi, kemampuan untuk bertindak, dan norma. Dengan mempengaruhi faktor lintas sektor ini, intervensi SBCC mungkin dapat menghasilkan perubahan. Mereka bertindak dalam isolasi atau dalam kombinasi.
3. SBCC beroperasi melalui 3 strategi utama dikarenakan pendekatan ekologi, pertama advokasi untuk perubahan kebijakan dan mobilisasi sumber daya, kedua mobilisasi sosial yang termasuk didalamnya mobilisasi komunitas untuk keterlibatan koalisi yang lebih luas dan penguatan kapasitas mitra dan sekutu dari tingkat internasional hingga komunitas; dan *Behaviour Change Communication (BCC)*, menggunakan pendekatan interpersonal, kelompok, media massa, dan juga teknologi informasi baru untuk perubahan perilaku dan norma sosial tertentu. Definisi dari strategi kunci ini membantu untuk memahami mengenai SBCC. Seringkali, proyek hanya berfokus pada BCC hanya sebatas mengubah perilaku individu tanpa menanganinya, contohnya adalah permintaan untuk penyampaian layanan yang lebih mudah diakses dan ramah melalui advokasi. Tidaklah penting atau bahkan realistis bahwa satu proyek atau entitas

memimpin ketiga strategi karena mereka dapat melibatkan mitra dan sekutu yang sudah melakukannya. Tetapi, SBCC harus selalu dikaitkan dengan layanan atau produk yang dapat diakses oleh banyak orang. Upaya SBCC tidak akan optimal kalau tidak pada tempatnya dan kegiatan komunikasi tidak memberikan dampak yang signifikan.



Gambar 2.5 Strategi Utama Social Behaviour and Change Communication (SBCC)

Sumber: Mckee et al. (2014)

Advocacy

Advokasi adalah upaya untuk meyakinkan orang lain atau orang yang dapat membantu atau mendukung sesuatu yang diinginkan (Rachmawati, 2019). Dalam konteks politik advokasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi institusi politik, ekonomi dan sosial.

Tujuan utama advokasi adalah *to encourage publicies that are supportive to health*. Dapat disimpulkan bahwa advokasi merupakan kombinasi antara pendekatan atau kegiatan individu dan sosial, untuk memperoleh komitmen politik,

dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dan adanya sistem yang mendukung terhadap suatu program atau kegiatan.

Dari Iskandar (2016) menguraikan pentingnya tujuan dan kegiatan advokasi di bidang politik khususnya untuk perempuan. Kegiatan advokasi dalam ranah ini penting untuk dilakukan karena:

- 1) Mendorong kebijakan yang responsif gender, melalui kegiatan advokasi ini kelompok perempuan dapat mempengaruhi kebijakan publik agar lebih responsif terhadap isu gender. Ini termasuk pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga kebutuhan khususnya perempuan dapat terpenuhi dalam berbagai sektor yaitu kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.
- 2) Meningkatkan keterwakilan perempuan, kegiatan advokasi membantu mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan pemerintah, contohnya sesuai dengan amanat Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau CEDAW dan Undang – Undang Pemilu di Indonesia, adanya kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan untuk perempuan.
- 3) Memberdayakan Perempuan, hal ini penting untuk mengambil peran aktif dalam ranah politik. Dalam hal advokasi penting untuk perempuan juga mendapatkan pendidikan politik untuk memahami hak – hak mereka serta cara berpartisipasi secara efektif dalam proses politik.

- 4) Membangun jaringan dan koalisi, dalam advokasi seringkali melibatkan pembentukan jaringan antara berbagai individu dan juga organisasi yang memiliki visi serupa, hal ini dapat memperkuat suara kolektif untuk memperjuangkan agenda politik perempuan dan juga melahirkan perubahan yang lebih besar.
- 5) Mengatasi diskriminasi dan stigma, advokasi memiliki peran penting untuk mengubah stigma negatif yang melekat pada perempuan dalam ranah politik. Dengan meningkatkan kesadaran akan hak – hak politik perempuan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi perempuan, advokasi dapat membantu mengurangi diskriminasi atas gender perempuan yang ada.

Advokasi dalam ranah politik perempuan merupakan alat penting untuk mencapai kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan. Dengan memperjuangkan hak perempuan dan mendorong kebijakan yang mendukung, advokasi dalam hal ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Social & Community Mobilization

Ka'issa et al. (2024) menjelaskan bahwa mobilisasi komunitas dan mobilisasi sosial adalah konsep penting dalam konteks politik perempuan, fungsi dari kedua konsep ini adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan partisipasi politik perempuan. Mengenalkan hak perempuan dapat melalui mobilisasi komunitas dan berperan aktif dalam proses politik. Dengan membangun jaringan dukungan di tingkat ini, perempuan dapat saling berbagi mengenai strategi dalam politik dan juga pengalaman. Mobilisasi komunitas menurut Ka'issa et al. (2024) juga melahirkan solidaritas diantara perempuan dari berbagai latar belakang, memberikan

perempuan ruang untuk bersatu dalam memperjuangkan kepentingan bersama termasuk juga demonstrasi, lobi kepada pembuat kebijakan dan kampanye media untuk membangun kesadaran terhadap isu – isu yang dihadapi perempuan. Dengan mobilisasi yang efektif pula suara perempuan dapat lebih didengar dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh para pembuat kebijakan dapat lebih adil.

Menurut Mckee et al. (2014) mobilisasi sosial seringkali terjadi di tingkat nasional di antara organisasi masyarakat sipil dan bagian dari pemerintah untuk membangun koalisi untuk isu – isu tertentu, mobilisasi masyarakat dapat melakukan hal yang sama juga di tingkat masyarakat dengan teknik yang sama. Strategi ini cenderung menggunakan teknik komunikasi sama seperti advokasi untuk mencapai tujuan mereka. Biasanya teknik yang digunakan untuk mobilisasi sosial dan masyarakat adalah:

1. Publisitas.
2. Diskusi publik.
3. Penyebaran informasi menggunakan media massa dan masyarakat.
4. Pelatihan/koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Behaviour Change Communication (BCC)

BCC juga menggunakan proses sistematis, yaitu Penelitian formatif dan analisis perilaku, Perencanaan komunikasi, Implementasi, Pemantauan dan evaluasi. Dalam proses ini juga audiens disegmentasikan dengan cermat, pesan dan materi juga diuji terlebih dahulu. Media massa serta saluran interpersonal digunakan untuk menapai tujuan perilaku yang ditentukan. Perubahan perilaku tentunya memerlukan proses yang panjang, jadi terdapat langkah – langkah yang dapat diikuti untuk mencapai

perubahan yang diinginkan sebagai berikut:

1. Pra – kontemplatif atau tidak sadar.
2. Kontemplatif atau sadar.
3. Persiapan untuk bertindak.
4. Tindakan atau mencoba.
5. Mempertahankan.
6. Penghentian atau Advokasi atau Transendensi.

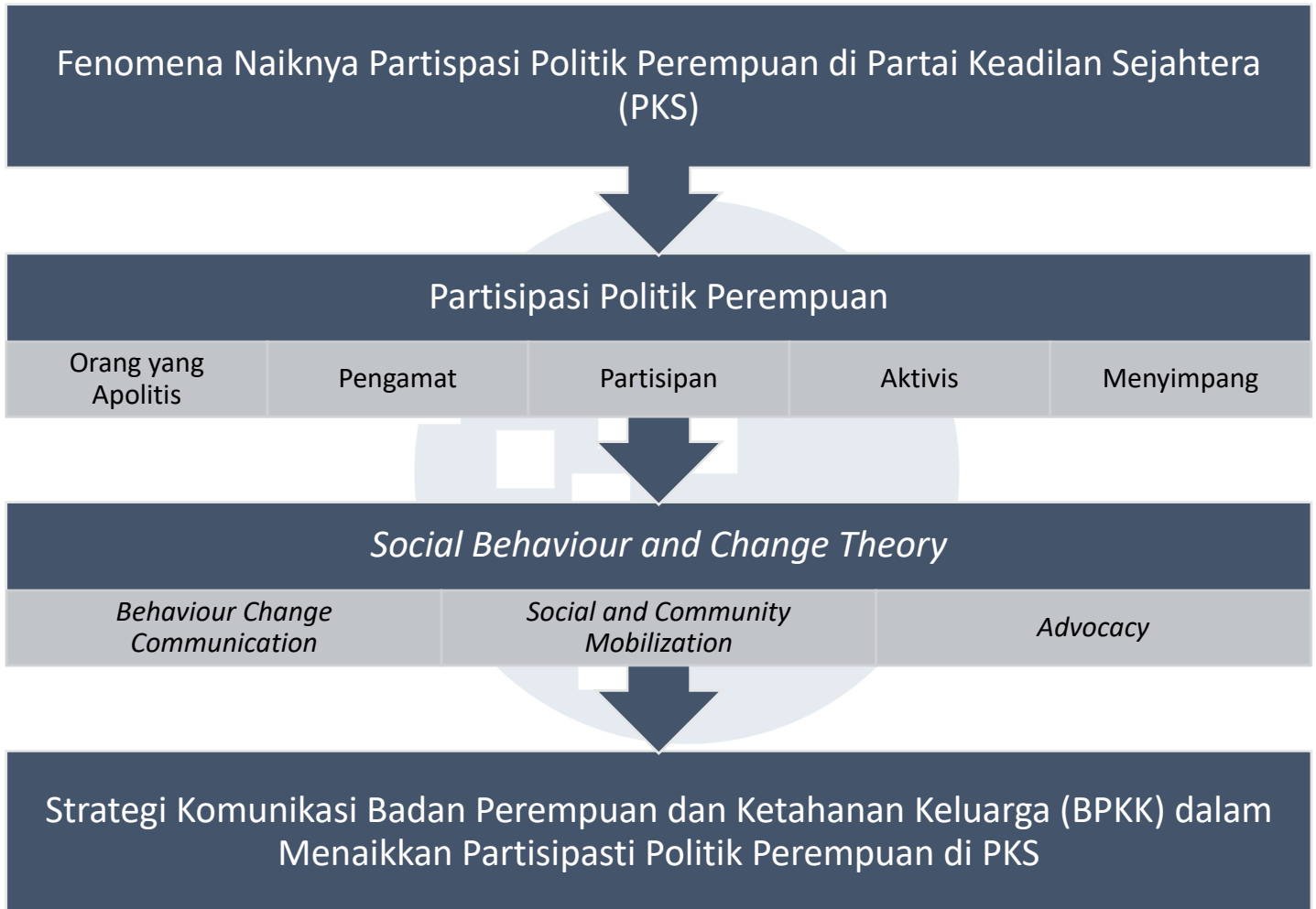
Holdan dan Zakharchenko dalam Handoyo & Lestari (2017) mengartikan pendidikan politik sebagai pendidikan publik (*public education*), yaitu upaya melibatkan warga negara dalam suatu komunitas untuk menciptakan budaya partisipasi. Menurut Giesecke dalam Handoyo & Lestari (2017), pendidikan politik dapat dipahami dalam arti “*politische bildung ist bildungswissen, orientierungswissed, velhaltungweissen und aktionswissen*”. Pendidikan politik adalah *bildungswissen* yang artinya bisa mengetahui bentuk dan gambaran dari manusia (*mensbeeld*) serta pengembangannya dan gambaran kebudayaan bangsa sendiri, sehingga orang dapat sadar akan kekuatan pribadi dan kemampuan bangsanya sendiri, menyadari akan identitas bangsa, menimbulkan rasa percaya diri yang kuat, memahami benar kekuatan bangsa sendiri, pandangan hidup, filsafat hidup (dalam hal ini pancasila), dan sanggup menghapus kompleks rasa rendah diri serta dependensi pada kekuatan atau bangsa lain. Dalam arti *orientierungswissen* yaitu mampu berorientasi pada paham kemanusiaan yang bisa memberikan kebahagiaan dan umat manusia. Dalam arti *verhaltungswissen* yaitu memahami hukum, tata tertib, pertaturan yang menuntun semua tingkah laku politik, sehingga subjek menjadi lebih cerdas dan lebih bijaksana dalam menanggapi situasi dan kondisi yang ada. Dalam arti *aktionwissen* adalah mampu bertingkah laku tepat, cermat dan benar, sebab didukung oleh kebenaran dan keadilan, juga disertai oleh refleksi

objektif, dan berwawasan kritis.

Menurut Handoyo & Lestari (2017) pentingnya Pendidikan politik ini tidak lain bertujuan untuk *Behaviour Change Communication (BCC)* yang Dimana konsep ini penting dalam konteks politik perempuan karena konsep ini mampu untuk mengubah sikap, perilaku, dan pemahaman Masyarakat mengenai isu – isu yang berkaitan dengan hak dan partisipasi politik perempuan. Konsep ini juga dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan karena konsep ini berfokus pada penyampaian informasi yang jelas dan juga mudah dipahami mengenai politik perempuan, serta pentingnya peran dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan Keputusan. BCC juga dapat digunakan untuk mengubah stigma negatif terhadap partisipasi politik perempuan. Dengan menggunakan pendekatan, pesan – pesan yang tepat untuk mengatasi stereotip gender dan mempromosikan kepercayaan diri perempuan untuk terlibat dalam politik.



2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.6 Gambar Alur Kerangka Pemikiran

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA